

Tindakan Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi

Horidatul Bakiyah

Akademi Komunikasi BSI Jakarta
e-mail: horidatul.hbk@bsi.ac.id

Cara Sitasi: Bakiyah, H. (2018). Tindakan Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi. *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 224–230.

Abstract - *Humans act with regard to all things and directs its behavior observed in the act as it is interpreted. The political actors are women who are on the Islamic-based political organization that PKS run regeneration. Recruitment function as a function that is executed in the PKS women regeneration. The involvement of women in the political sphere and democracy should be a requirement, so as to give birth to the protection of the rights and interests of women. This study using Alfred Scutz theory that social science thinking is closely related to various forms of interaction which is essentially political communication in society that women's political action. The symptoms in the social world is nothing but an object of formal study (focus of interest) of social phenomenology, namely the women's first political action, which is both a motive for the actions, and the third mainstreaming women's consciousness. The paradigm used in this research were interpretative paradigm and approach used is a qualitative approach , whereas the method used in this study is the phenomenological method. In this study the writes found that in women's political action PKS divided into three normative action , aggressive action , and collaborative action . While the women's political motives are involved and merged into PKS divided into two , in order to motive and because motive . And women's political consciousness of PKS in the regeneration grouped into consciousness supervision (on the surface) and consciousness underground (below the surface)*

Keywords: *Actions, Motif, Consciousness, Politics, Women, Regeneration*

PENDAHULUAN

Almond dan Powell mendefinisikan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (*prerequisite*) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain (Arifin, 2011) . Plano (1982:24) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik (Cangara, 2009). Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut(Nimmo, 2000). Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan salah satu upaya mensejahterakan masyarakat. Kondisi perempuan diyakini dapat berubah kearah yang lebih baik jika banyak perempuan bergabung dalam organisasi-organisasi ataupun partai-partai politik(Aalberg & Jenssen, 2007). Kesempatan perempuan Indonesia untuk mendapat keadilan berpartisipasi dalam politik mulai terbuka lebih luas sejak diberikannya kuota 30 persen di parlemen bagi perempuan Indonesia melalui UU Pemilu No. 12 tahun 2003 pasal 65 sehingga mampu

terselenggaranya kesetaraan gender dan keadilan gender. UU No. 12 tahun 2003 pasal 65 (1) tersebut menyatakan : “setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”(Arif, n.d.).

Keberadaan perempuan di parlemen tidak boleh hanya menjadi hiasan, sebagai pemanis parlemen yang didominasi oleh para laki-laki. Tidak juga hanya untuk memenuhi syarat kuota 30% semata. Bustanul Arif menyoroti kualitas politik perempuan, dalam bukunya ‘Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Di Daerah Jawa Timur’, ia menyatakan : Kuota 30% yang telah dicapai tidak akan bermakna sama sekali manakala perempuan tidak membekali diri dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Jika target hanya memenuhi kuota, atau sekedar ada perempuan yang duduk di kursi DPR atau BPD, tanpa bekal kualitas yang memadai, maka hal itu sama dengan merendahkan martabat perempuan, karena orang-orang yang masuk untuk memenuhi kuota tersebut hanya akan menjadi pajangan politik (Arif, n.d.)

Kaderisasi merupakan suatu kebutuhan internal yang harus dilakukan demi kelangsungan organisasi. Seperti hukum alam akan adanya suatu siklus, dimana semua proses pasti akan terus berulang dan terus berganti. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Sistem prekrutian PKS yaitu melalui Sistem Management Tarbiyah dengan menerapkan kurikulum dan materi yang di buat oleh orang orang Tarbiyah PKS. Tarbiyah PKS sendiri menyeleksi, meramu, dan kemudian mengembangkan sendiri dengan bimbingan seorang *murrabbi*. Perempuan PKS menjalankan fungsi Murabbi. Berbeda dengan partai lain, kaderisasi tetap dijalankan, tapi fungsi Murrabbi tidak dijalankan oleh kader partai lain termasuk kader perempuan. Partai PKS yang awalnya dianggap paling tenang, mulai goyah semenjak pasca kasus korupsi daging impor sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Hal tersebut menjadi problem, tantangan dan peluang politik perempuan PKS untuk bertindak politik dalam mengkader massa supaya menjadi bagian dari partai PKS.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma interpretatif adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Denzin & Lincoln, 2009).

Dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena (Nindito, 2005). Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya “apa pengalaman utama yang akan dijelaskan dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama (Sobur, 2013). Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu pengalaman, kehidupan, dan

memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Tindakan Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi (1) Tindakan normatif merupakan tindakan yang dilakukan politisi perempuan PKS dalam kaderisasi yang memang sesuai dengan aturan dan standar perilaku dalam berorganisasi. Tindakan normatif cenderung bersifat objektif sesuai dengan fakta yang hadir dalam suatu organisasi. (2) Tindakan agresif merupakan tindakan yang dilakukan politisi perempuan PKS dalam kaderisasi yang dengan sadar melakukan baik atas kemauan individu, kepentingan golongan dan partai untuk mencapai tujuan organisasi. Tindakan agresif cenderung lebih subjektif karena merupakan hasil dari interaksi dan konstruksi yang dimaknai seseorang. (3) Tindakan kolaboratif merupakan penggabungan tindakan yang sifatnya netral dengan mengkombinasi tindakan antara tindakan normatif dengan tindakan agresif yang mempertimbangkan aspek standar perilaku yang normatif dan tetap mementingkan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan partai.

Tabel 1. Hasil Tindakan Politik Perempuan

Kategori Tindakan	Normatif	Agresif	Kolaboratif
Politik	Visi, Jaringan	Jabatan, Kekuasaan	Strategi, Metode, Proses
Fungsi Parpol PKS	Aspirasi, Legalisasi	Krisis Kepercayaan	Edukasi, Rekrutment
Komunikasi	Untuk Rakyat	Partai Kader	Partai Dakwah
Kader	Penyampai Informasi	Kebutuhan	Bentuk Dan Tindakan Pertanggungjawaban
Perempuan Politik	Penggerak Partai	Asset	Penerus Dakwah
UU Pemilu	Makna Politik	Bentuk Kepedulian	Nilai, Proses, Tujuan
Kemampuan	Porsi Pas	Porsi > 30 %	Kualitas
Hambatan	Akhlik Baik	Tanggung Jawab	Komunikasi
Pajangan Politik	Manajemen Waktu	Eksternal, Kepentingan	Mengkader
Perempuan Dapur	Bentuk Prihatin	Suatu Metode	-
Issue	Banyak Peran	-	Pilihan Hidup
Program Kerja	Ujian	Campur Tangan Pihak Lain	Instrospeksi, Motivasi
	Hiburan, Sosial	Sistem Manajemen Tarbiyah	Edukasi

PKS Dalam Kaderisasi

Kategori Motif Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi (1) Motif “untuk” (*in-order-to motives*) merupakan motif dengan tujuan yang digambarkan

sebagai maksud, rencana, harapan, minat dan sebagainya yang diinginkan aktor dan karena berorientasi masa depan. (2) Motif “karena” (*because motives*) merupakan motif yang merujuk kepada masa lalu aktor dan tertanam dalam pengetahuannya yang terendapkan (*preconstituted knowledge*) dan karenanya berorientasi masa lalu. Sehingga disebut sebagai alasan atau sebab (Peter & Luckman, 1990).

Tabel 2. Hasil Penelitian Motif Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi

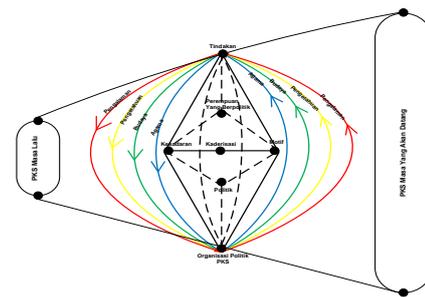
<i>In Order To</i>	<i>Because</i>
Untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat	Karena prihatin melihat kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia
Untuk melakukan pergerakan dan perubahan masyarakat Indonesia yang lebih baik	Karena semenjak kecil sudah terbiasa berada dan berpengalaman di dalam sebuah organisasi islam
Keinginan untuk meniadakan mayoritas masyarakat Indonesia menganut islam yang sesungguhnya	Karena takdir Allah diberikan amanah oleh management PKS, karena jabatan di PKS bukan kader yang meminta, tetapi management yang menunjuk jabatan atas amanah tersebut
Untuk berdakwah menialankan amanah yang diminta masyarakat	Karena lingkungan keluarga dan tetangga sekitar
Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan	Karena melihat acara yang dibuat oleh kader PKS, dan semangat kebersamaan yang dirasakan kader PKS

Kategori Kesadaran Politik Perempuan PKS Dalam Kaderisasi (1) Kesadaran Di atas permukaan (*Supervisi*) merupakan kesadaran politik perempuan yang sifatnya di atas permukaan (*supervisi*) mengandung arti bahwa kesadaran tersebut muncul dan nyata, sehingga terlihat dan menyadari kesadaran tersebut. (2) Kesadaran Di bawah permukaan (*underground*) merupakan kesadaran politik perempuan yang sifatnya di bawah permukaan (*underground*) mengandung arti bahwa kesadaran tersebut berada pada tataran tersembunyi yang menyangkut nilai-nilai kehidupan sehingga tanpa disadari kesadaran tersebut muncul dalam diri politisi khususnya dalam hal ini politisi perempuan.

Tabel 3. Hasil Penelitian Kesadaran Politik Perempuan PKS Dalam kaderisasi

Kesadaran Supervisi	Kesadaran Underground
Perwakilan Perempuan	Perempuan Sebagai Pendidik
Penampilan	Perempuan Islami
Pengalaman Dan Pengetahuan Berorganisasi	Bermanfaat Bagi Orang Lain
Manajemen Kerja Dan Waktu	Memaknai Hidup
Semangat Kerja	Keterampilan Hidup
Sarana Sharing	Kepedulian
	Menularkan Nilai-Nilai Kebaikan

Humanis Political Models



Gambar 1. Humanis Political Models

Humanis Political Models dianalogikan sebagai bumi yang merupakan bagian dari alam semesta, yang mencerminkan makna, tujuan dan hakikat hidup yang sebenarnya. Dalam perspektif islam tujuan hidup adalah Rahmatan Lil Alamin. Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta. Dalam Alquran disebutkan “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS.Al-Alnbiyah:107)

Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah “Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung, atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa keindahan islam. Dengan hewan saja dilarang untuk sewenang-wenang, apalagi dengan manusia. Manusia dan kekuasaan seharusnya dikelola dengan indah. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup di dalam bumi yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi, tidak terlepas dari makna kekuasaan. Kekuasaan ini dimaknai berbeda dan lebih. Hal ini diutarakan oleh Ibnu Khaldun (Khaldun, 2001).

Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan yang substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena kekuasaan dan politik secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada maslahat, artinya sejahtera yang cakupannya pada kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan lain-lain adalah termasuk bagian dari tanggung jawab politik dan kekuasaan. Rumusan kekuasaan dan politik seperti yang ditawarkan Ibnu Khaldun bermuara dari pemahaman bahwa kekuasaan dan politik merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah dalam rangka implementasi Alquran bagi segenap manusia untuk kemaslahatan. Model humanis politik ini mengabstraksikan politik dan kekuasaan sebagai tindakan yang berprikemanusiaan dimana tujuannya membantu yang lemah, merangkul semua pihak,

menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, berprasangka baik terhadap pemeluk agama, menghindari tindakan makar dan lain-lain. Model ini adalah cermin etika politik yang semestinya menjadi pijakan praktis dalam setiap tindakan politik. Jelasnya, konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun ini adalah bagaimana agar kekuasaan maupun politik itu senantiasa direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan.

Model ini memiliki dua sumbu utama. Dalam sumbu vertikal yaitu tindakan politik dan organisasi politik dimana yang menjadi titik pusatnya adalah kaderisasi. Kaderisasi ini merupakan perlakuan organisasi untuk *suistanbility* politik yang dilakukan dan refleksi tindakan anggota melakukan tindakan politik yang berprilaku kemanusiaan dengan kegiatan kaderisasi. Sumbu utama horizontal kesadaran dan motif perempuan sekaligus kesadaran dan motif organisasi politik tersebut.

Sirkuit humanis dalam model ini adalah agama, budaya, pengetahuan, dan pengalaman akan menjalankan organisasi menjadi rumah berikut dengan humanis tindakan perempuan dalam kaderisasi. Tentu saja dalam hal ini dipengaruhi sirkuit di masa lalu yang akan menjadikan organisasi politik PKS menjadi lebih kokoh dan mapan di masa yang akan datang.

Tindakan Politik Perempuan Dalam Fenomenologi Alfred Scutz

Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat dalam hal ini yakni fenomena tindakan politik dilakukannya tindakan politik perempuan dalam sebuah partai politik (Eagly & Karau, 2002). Peranan fenomenologi adalah penting ketika di tempat pada tindakan praktis perempuan sebagai jiwa dari metode penelitian sosial komunikasi politik fokus pada pola perilaku seorang aktor politik yaitu perempuan (Sukidin & Basrowi, 2002). Fenomenologi Schutz sebenarnya lebih kepada penemuan cara pandang dunia baru yaitu tindak politik perempuan yang digali dari makna yang terbangun dari realitas politik perempuan.

Semenjak nuansa realitas sosial berada pada tingkat interaksi individual maka semua analisa sosial yang valid harus menunjuk pada perilaku individual (Verge, Espirito-Santo, & Wiesehomeier, 2015). Perilaku individual ini terbentuk oleh arti subyektif yang intensif dari individu. Perilaku individual terbentuk berdasarkan pada tindakan. Perilaku individual tersebut merupakan tindakan politik yang dilakukan oleh perempuan PKS. Selanjutnya dalam proses pemaknaan tindakan perempuan dalam politik yang aktif suatu

kesepakatan ini merupakan konsensus baru pada interpretasi terhadap perpolitikan kelangsungan di PKS berdasarkan kesepakatan kita sebagai peneliti dengan "obyek penelitian" yang sekaligus sebagai subyek yang menginterpretasikan dunia sosial dalam kerangka besar proses pencarian dalam proses pemahaman terhadap konstruksi makna bersama yang dinamakan intersubjektivitas (Aalberg & Jenssen, 2007).

Tindakan politik perempuan PKS dalam kaderisasi dipengaruhi oleh keadaan perempuan PKS itu sendiri yang terdiri atas pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki dan orang-orang yang mendukung yang berada di lingkungan sekitar perempuan PKS tersebut. Perempuan PKS melakukan tindakan politik dalam kaderisasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan karena berhubungan dengan kaderisasi yang mempersiapkan generasi selanjutnya dalam mengisi dan menggerakkan PKS.

Motif Politik Perempuan Dalam Fenomenologi Alfred Scutz

Motif "untuk" merupakan tujuan yang digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, minat dan sebagainya yang diinginkan aktor dan karena berorientasi masa depan. Motif pertama berlaku pada perempuan PKS yang menginginkan harapan kondisi PKS yang akan datang dan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama kepentingan dan perlindungan terhadap perempuan. Motif "karena" berlaku pada perempuan PKS yang menyatakan alasan yang berdasarkan pengalaman perempuan PKS yang terendapkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh perempuan PKS dengan melihat ke belakang kondisi kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi.

Kesadaran Politik Perempuan Dalam Fenomenologi Alfred Scutz

Perempuan PKS merupakan makhluk individu dan makhluk sosial yang berada pada organisasi partai politik PKS yang melakukan kegiatan bersama-sama dengan kader-kader perempuan PKS lainnya. Dengan kesadaran masing-masing yang telah dimiliki tercipta dari hasil komunikasi dan interaksi yang berjalan dalam kelompok tersebut.

Fenomenologi Schutz memandang dunia kehidupan sehari-hari ialah realitas fundamental dan terpenting manusia yang dikonstruksikan sebagai intersubjektivitas (Scutz, 1966). Intersubjektivitas yang dibangun oleh perempuan PKS merupakan kesepakatan bersama dalam membangun makna bersama sebagai seorang kader perempuan PKS yang memiliki peran dalam mengkader yang

lainnya. Dengan kesadaran yang mereka miliki, keterlibatannya di dalam sebuah partai politik PKS merupakan sebagai panggilan berdakwah menyampaikan kebaikan dan melengkapi tugas dari kader laki-laki.

Manajemen Organisasi PKS

Di dalam PKS fungsi perencanaan dijalankan kaderisasi untuk memetakan calon kader dan merencanakan program-program awal yang ditujukan untuk menarik massa atau masyarakat supaya tertarik dan mengetahui tentang PKS dan program kerja PKS. Kemampuan kader yang berada di PKS ditempatkan pada posisi yang memang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya. Dalam kaderisasi di PKS, tiap-tiap departemen memiliki departemen khusus kaderisasi yang dijalankan dan diketua seorang laki-laki. Selain itu terdapat departemen bidang perempuan dan ketahanan keluarga yang menjalankan fungsi kaderisasi. PKS melakukan program kerja diantaranya yang sifatnya mendidik berupa sosialisasi, pengajian, pelatihan dan seminar, selain itu ada juga program kerja yang sifatnya menghibur seperti acara piknik yang biasa disebut rihlah dan ada juga yang sifatnya sosial seperti santunan anak yatim, kunjungan ke panti jompo dan pengecekan pengobatan gratis. Program-program yang dijalankan kader sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat dilakukan secara berbeda antar level yang ada di PKS, namun sebenarnya esensi yang diharapkan adalah sama. Program kerja dan kader merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kader yang melaksanakan program kerja tersebut guna menarik perhatian masyarakat, yang nanti hasil akhirnya juga bermuara pada proses kaderisasi.

PKS memiliki program kerja yang sifatnya *continue* yang bisa dijadikan fungsi pengawasan yaitu Sistem Manajemen Tarbiyah, program inilah yang menjadi keunggulan PKS untuk mengawasi para kadernya tetap pada ajaran dan aturan PKS di dalam tarbiyah tersebut. Komunikasi yang dijalankan PKS dalam kaderisasi lebih menekankan kepada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dianggap lebih efektif untuk mempengaruhi dan merubah perilaku calon kader. Di dalam Tarbiyah yang dijalankan PKS menggunakan komunikasi interpersonal. Sedangkan komunikasi yang dijalankan oleh internal PKS selayaknya organisasi lain dapat berupa komunikasi formal dalam bentuk rapat atau instruksi lain yang bisa bersifat vertical maupun horizontal.

Tindakan Politik dipengaruhi Pengetahuan Dan Pengalaman

Konstruksi sosial diperoleh dari proses sosial berupa tindakan dan interaksi yang dilakukan

perempuan PKS dalam menciptakan realitas yang dilakukan dalam bentuk peran yang dijalankan oleh perempuan PKS. Dalam hal ini perempuan PKS merupakan media produksi dan reproduksi dalam mengkonstruksi makna sosial, pemahaman-pemahaman terhadap makna politik dalam bermasyarakat, pemahaman bermasyarakat, pemahaman peran perempuan dan pemahaman lain yang esensinya adalah menunjang dikatakannya suatu tindakan politik.

Pengetahuan diperoleh dari pengolahan informasi pada akal sehat masyarakat. Berdasarkan pengetahuan masyarakat atas tindakan politik perempuan PKS, masyarakat dapat menilai sendiri nilai yang diberikan dan eksistensi tindakan politik perempuan PKS dalam parpol dan masyarakat. Perempuan PKS pun berdasarkan pengetahuan yang ia miliki hasil dari konstruksi sosial dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat supaya ada perubahan segi kognitif hingga segi konaktif masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang dimiliki mempengaruhi kenyataan sosial terhadap tindakan politik perempuan dalam kaderisasi. Begitu juga perempuan politik PKS, berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, perempuan dapat melihat secara riil kondisi dan masalah masyarakat yang sebenarnya, dan seharusnya berusaha dengan kesadaran yang ia miliki dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pengetahuan merupakan bagian dari pengalaman yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan perempuan politik PKS. Pengalamannya tersebut pasti selalu melibatkan masyarakat untuk bisa menarik masyarakat khususnya program kaderisasi yang diambil dari bagian masyarakat, sehingga masyarakat adalah elemen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan oleh pengalaman perempuan politik PKS dalam kaderisasi. Eksternalisasi yang dilakukan perempuan politik PKS adalah bermasyarakat, ia melakukan penyesuaian diri dengan kondisi masyarakat sekitar pada saat itu dengan berbagai cara yang menganggap bahwa ia merupakan individu dan juga bagian dari masyarakat, yang sifatnya netral menyuarakan masyarakat.

Obyektivasi yang dilakukan perempuan politik PKS dalam kaderisasi adalah interaksi sosial yang dilakukan perempuan politik PKS setelah berada pada sebuah tatanan lembaga parpol yaitu PKS, yang sudah dibekali beberapa kemampuan dan keterampilan sebagai politisi perempuan. Walaupun tujuannya adalah sama untuk masyarakat, tetapi kepentingan yang ia bawa tidak terlepas dari pengaruh yang diberikan PKS untuk kepentingan kader, parpol dan pada akhirnya masyarakat. Selain itu juga melekat pada visi, misi dan tujuan PKS itu sendiri. Internalisasi yang dilakukan melalui

tindakan politik perempuan PKS, perempuan PKS tersebut mengenal, mengetahui dan mengidentifikasi peran-perannya sebagai seorang kader dan sebagai bagian dari peran di keluarga hingga di masyarakat. Sehingga kesadaran perempuan PKS dalam bertindak politik dalam kaderisasi di PKS tersebut muncul setelah melalui ketiga tahap teori tersebut.

Tindakan Politik dipengaruhi Budaya Dan Agama

Karena faktor budaya, kategorisasi tindakan politik perempuan PKS terdapat kategori yang menyebutkan bahwa perkembangan politik sekarang perempuan dijadikan sebagai pajangan politik. Selain itu kontradiksi lain menyebutkan bahwa perempuan hanya cocok "di dapur", sehingga menimbulkan suatu pernyataan tentang makna "emansipasi perempuan". Agama merupakan suatu system pemikiran, serangkaian keyakinan, perilaku yang telah ditentukan, dan produk dari waktu dan ruang. Agama dapat mendorong kepercayaan, keseimbangan antara pekerjaan/kehidupan, empati dan perasaan kasih sayang terhadap orang lain, nilai asset manusia, pengembangan penuh dan aktualisasi diri seseorang, serta perilaku yang etis. PKS sebagai organisasi politik yang basisnya islam, maka tidak akan terlepas dari ajaran-ajaran islam.

KESIMPULAN

Kategorisasi tindakan politik perempuan PKS dalam kaderisasi dibedakan menjadi tiga yaitu tindakan normatif, tindakan agresif, dan tindakan kolaboratif. Kategorisasi motif yang dilakukan perempuan PKS dalam bertindak politik dalam ketertarikan dan bergabung di PKS terbagi menjadi dua yaitu pertama motif *In Order To*, yang berisi harapan dan keinginan-keinginan perempuan PKS untuk memperjuangkan perubahan kesejahteraan masyarakat terutama perempuan, dan secara agama menginginkan masyarakat Indonesia menganut islam secara kaffah, Yang Kedua motif *Because*, yang berisi pengetahuan yang terendapkan sehingga alasan-alasan yang merujuk pada masa lalu, karena perempuan PKS melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, karena perempuan PKS dipengaruhi oleh factor lingkungan sekitar termasuk keluarga, dan karena tertarik melihat program kerja dan kesolidan kader-kader di PKS.

Kategorisasi kesadaran politik perempuan PKS dalam kaderisasi terbagi menjadi dua, yaitu Pertama kesadaran Supervisi yakni kesadaran yang terlihat yang sifatnya diatas permukaan, Yang Kedua kesadaran Underground yakni kesadaran yang berada pada tingkat lebih dalam yang dapat dirasakan manusia sebagai nilai dari kebermanfaat dan kehidupan sebagai seorang manusia. Tindakan,

motif dan kesadaran politik perempuan PKS dalam kaderisasi dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, budaya, dan agama.

REFERENSI

- Aalberg, T., & Jansen, A. T. (2007). Gender Stereotyping of Political Candidates An Experimental Study of Political Communication. *Nordicom Review*.
- Arif, B. (n.d.). *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik Di Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Yayasan Cakrawala Timur.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik Filsafat Paradigma Teori Tujuan Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research* (Pustaka Be). Yogyakarta.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>
- Khaldun, I. (2001). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, Media*. Bandung: Rosda.
- Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*.
- Peter, B., & Luckman, T. (1990). *Tafsiran Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Scutz, A. (1966). *The Phenomenology Of The Social World*. London: Heinemann Educational Books.
- Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Rosda.
- Sukidin, & Basrowi. (2002). *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Verge, T., Espirito-Santo, A., & Wiesehomeier, N. (2015). The symbolic impact of women ' s representation on citizens ' political attitudes : Measuring the effect through survey experiments. In *4th European Conference on Politics and Gender: Power and Representation*. <https://doi.org/10.1029/2004GL020358>

PROFIL PENULIS

Horidatul Bakiyah, S.I.Kom, M.I.Kom Lahir di Jakarta, 23 Oktober 1990 adalah seorang dosen Program Studi Public Relations di Universitas Bina Sarana Informatika sejak tahun 2016. Dosen yang pernah mengajar di Universitas Serang Raya Jurusan Ilmu Komunikasi menyelesaikan

studi S1 Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations pada tahun 2011, dan studi S2 Magister Ilmu Komunikasi. Setelah lulus S1, Mengawali karirnya menjadi staff akreditasi Universitas Mercu Buana. Dilanjutkan pernah menjadi staff di Bank Syariah Mandiri selama 4 tahun. Hingga kini, di sela-sela menjadi ibu rumah tangga, membuka usaha bimbingan belajar di rumah.